

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Lembaga pendidikan merupakan sebuah wadah pendidikan yang mendidik seseorang untuk mampu berpikir teratur, sistematis dan mengembangkan kemampuan yang ada dalam diri orang tersebut. Dalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dijelaskan bahwa pendidikan adalah “usaha sadar dan direncanakan untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat bangsa dan negara.” Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa pendidikan menjadi wadah dalam mengembangkan seluruh potensi yang dimiliki oleh masyarakat. Melalui pengembangan potensi diri yang dilakukan secara berkala dan berlanjut di lembaga pendidikan maka akan meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Ketika sumber daya manusia Indonesia berkualitas otomatis lembaga pendidikan Indonesia juga berkualitas karena mampu menghasilkan lulusan yang baik. Tentu seluruh proses pendidikan yang dilakukan juga memiliki prosedur yang sistematis, terencana, dan memiliki sumber daya manusia dan non manusia yang memadai. Namun berdasarkan fakta, dalam pelaksanaannya sebuah lembaga pendidikan kerap kali dihadapkan pada problem-problem sistem pembelajaran, mulai dari penyiapan sarana dan prasarana, materi, tujuan bahkan sampai pada penyiapan proses.

Programme for International Student Assessment (PISA) yang merupakan program yang didirikan oleh negara-negara yang tergabung dalam *Organization for Economic Cooperation and Development (OECD)* yang bertujuan membantu negara-negara untuk mempersiapkan sumber daya manusia yang berkompetensi dan siap memasuki persaingan global (Agasisti, et al., 2018; Ikeda, M., & Echazarra, 2020). Fokus penilaian dalam PISA adalah literasi dasar membaca, menghitung dan sains. Dalam

laporan PISA pada tahun 2018 yang diumumkan pada 3 Desember 2019, (OECD, PISA 2018 dan Kemendikbud.go.id), diperoleh hasil untuk peringkat Indonesia adalah skor membaca berada pada urutan ke-72 dari 77 negara, skor matematika pada urutan ke-72 dari 78 negara, dan skor sains ada di urutan ke-70 dari 78 negara. Berdasarkan data tersebut dapat diketahui bahwa kualitas pendidikan di Indonesia masih tergaolong rendah karena belum mampu meningkatkan motivasi dan keinginan masyarakat dalam pendidikan untuk membaca, berhitung dalam matematika dan sains.

Menurut Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (2014.p.23), ada beberapa permasalahan yang dihadapi dalam mencapai target pembangunan pendidikan. Permasalahan pembangunan pendidikan tersebut adalah akses pendidikan yang belum merata, masih rendahnya proporsi guru yang memiliki kualifikasi akademik S1/D4 dan belum meratanya distribusi guru yang berdampak pada tidak seimbangnya rasio guru dan murid. Selain itu, belum optimalnya pelayanan dan pemerataan pendidikan sebagai akibat terbatasnya akses sarana prasarana pendidikan dan masih rendahnya kualitas dan kuantitas guru (Handoyo dan Zulkarnaen, 2019). Kemerdekaan Republik Indonesia yang sudah dijalani selama hampir 78 tahun belum membawa banyak perubahan yang berarti di bidang pendidikan, terlebih di daerah 3T (terdepan, terluar, dan tertinggal). Baik dalam skala nasional maupun di daerah 3T, permasalahan pendidikan muncul mulai dari aspek masukan (misalnya penerimaan peserta didik baru, seleksi masuk), proses (misalnya pembelajaran, penilaian, motivasi dan daya juang peserta didik dan guru, kompetensi dan kinerja guru, pengawasan dan pembinaan, tanggung jawab pendidikan oleh orang tua, peran masyarakat dalam pendidikan di sekolah), dan hasil (misalnya ujian dan penilaian, standar kelulusan). Indonesia merupakan negara multikultural yang sangat berpeluang untuk terjadinya konflik antar etnis dalam masyarakat jika tidak segera dijumpai perbedaan dan kesenjangan pembangunan di berbagai bidang termasuk pendidikan. Berkaitan dengan hal itu, Indonesia harus mengimplementasikan pendidikan multikultural dengan berfokus pada 1) daerah, etnis, dan tradisi, 2) keyakinan, dan 3) toleransi (Zarbaliyev, 2017).

Nusa Tenggara Timur adalah salah satu wilayah propinsi di Indonesia yang termasuk dalam kawasan daerah 3T (tertinggal, terdepan dan terluar) di Indonesia bagian timur. Berdasarkan data BPS (2020) NTT mempunyai IPM dari tahun 2014 hingga 2019 berkisar antara 62.26–65.23, angka yang cukup jauh dari IPM ideal (IPM=100). Nilai IPM tersebut menggambarkan bahwa daerah ini memerlukan perhatian lebih dalam pembangunan. Sebagai propinsi yang termasuk dalam daerah 3T, NTT memiliki permasalahan pendidikan yang kompleks, baik yang berkenaan dengan kepala sekolah, guru, peserta didik, fasilitas, maupun berkaitan dengan akses yang belum merata. Selain itu, kondisi geografis Nusa Tenggara Timur yang terdiri dari lebih dari satu pulau menjadi salah satu penghambat dalam pelaksanaan pemerataan aksesibilitas penduduk terhadap fasilitas kesehatan dan pendidikan (Muhammad dkk., 2020).

Khusus berkaitan dengan kepala sekolah, dalam pasal 15 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah ditegaskan bahwa beban kerja kepala sekolah sepenuhnya untuk melaksanakan tugas pokok manajerial, pengembangan kewirausahaan dan supervisi kepada guru dan tenaga kependidikan. Beban kerja yang dilaksanakan kepala sekolah bertujuan untuk mengembangkan sekolah dan meningkatkan mutu sekolah berdasarkan 8 (delapan) Standar Nasional Pendidikan. Di daerah-daerah 3T, persentase kepala sekolah layak hampir semuanya di bawah persentase nasional, yang berarti banyak kepala sekolah di daerah 3T tidak layak dari segi kemampuan, kompetensi, dan latar belakang pendidikan (Bappenas, 2016).

Jumlah guru di daerah 3T masih sangat kurang, penyebaran yang tidak merata dan berimbang, kemampuan profesional tidak memenuhi kriteria yang disyaratkan, ketidaksesuaian kualifikasi pendidikan dengan bidang kerja, rasio guru siswa berada di bawah angka nasional 14,73, rasio guru/sekolah di bawah angka nasional 18,41, dan persentase guru layak di bawah angka nasional 87,25% (Bappenas, 2014). Berkaitan dengan profesionalisme guru, dalam Permendiknas Nomor 16 Tahun 2007 tentang

Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru SD/MI, secara tegas diuraikan bahwa kualifikasi akademik guru diperoleh melalui pendidikan formal minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dalam bidang pendidikan SD/MI (D-IV/S1 PGSD/PGMI), atau psikologi yang diperoleh dari program studi yang terakreditasi.

Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah salah satu provinsi yang tergolong miskin di Indonesia yang menempati urutan ke 3. Berdasarkan data dari BPS Nasional, tingkat kemiskinan di NTT: 21%. Penyebabnya adalah pembangunan yang kurang merata, tingkat pendidikan yang masih rendah, pertumbuhan ekonomi terhambat, serta rendahnya produktivitas. Dari 22 kabupaten kota yang ada, terdapat 18 kabupaten yang tergolong daerah 3T di NTT, terdiri dari 7 kabupaten terdepan dan 11 kabupaten tertinggal. Rinciannya seperti dalam tabel berikut:

Tabel 1.1 Daftar Kabupaten Terdepan di Propinsi NTT

| No | Kabupaten |
|----|--------------------|
| 1 | Kupang |
| 2 | Timor Tengah Utara |
| 3 | Belu |
| 4 | Alor |
| 5 | Rote Ndao |
| 6 | Sabu Raijua |
| 7 | Malaka |

Sumber: BPS Nasional 2019

Tabel 1.2 Daftar Kabupaten Tertinggal di Propinsi NTT

| No | Kabupaten |
|----|----------------------|
| 1 | Sumba Barat |
| 2 | Sumba Timur |
| 3 | Timor Tengah Selatan |
| 4 | Lembata |
| 5 | Ende |
| 6 | Manggarai |

| | |
|----|------------------|
| 7 | Manggarai Barat |
| 8 | Sumba Tengah |
| 9 | Sumba Barat Daya |
| 10 | Nagekeo |
| 11 | Manggarai Timur |

Sumber: BPS Nasional 2019

Berdasarkan gambar di atas, Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) termasuk sebagai satu dari 7 Kabupaten terdepan yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kabupaten TTU masih membutuhkan perbaikan dan peningkatan sumber daya manusia yang hendaknya dilakukan oleh pemerintah melalui pendidikan. Kabupaten TTU memiliki 24 kecamatan, 33 kelurahan dan 160 desa. 24 kecamatan di Kabupaten TTU adalah; 1) *Miommafi Timur*, 2) *Miomafo Barat*, 3) *Biboki Selatan*, 4) *Biboki Utara*, 5) *Biboki Anleu*, 6) *Noemuti*, 7) *Kota Kefamenanu*, 8) *Insana*, 9) *Insana Utara*, 10) *Noemuti Timur*, 11) *Miomafo Tengah*, 12) *Musi*, 13) *Mutis*, 14) *Bikomi Selatan*, 15) *Bikomi Tengah*, 16) *Bikomi Nilulat*, 17) *Bikomi Utara*, 18) *Naibenu*, 19) *Insana Fafinesu*, 20) *Insana Barat*, 21) *Biboki Tan Pah*, 22) *Biboki Moenleu*, 23) *Biboki Feotleu*, dan 24) *Insana Tengah*.

Bertolak dari Badan Pusat Statistik data Sakernas (2018) mencatat bahwa penduduk TTU usia 15 tahun ke atas yang bekerja kebanyakan mempunyai tingkat pendidikan SD ke bawah yaitu sebanyak 65,78%. Sedangkan tamatan Diploma atau selebihnya hanya berjumlah 11,10%. Data ini menunjukkan bahwa tingkat pendidikan masyarakat di Kabupaten TTU masih sangat rendah atau masih sedikit yang memiliki kualifikasi pendidikan S1 dan S2. Selain itu Angka Partisipasi Sekolah (APS) pada tahun 2018 untuk penduduk usia 7-12 tahun (SD) berjumlah 99,48% yang bersekolah sedangkan sisanya tidak, untuk penduduk usia 13-15 tahun (SMP) yang bersekolah berjumlah 92,75% sedangkan sisanya tidak, untuk penduduk usia 16-18 tahun (SMA) yang bersekolah berjumlah 64,97% sedangkan sisanya tidak sekolah. Dari data tersebut terlihat bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan maka semakin sedikit jumlah penduduk usia sekolah yang berpartisipasi dalam sekolah. Hal ini menunjukkan bahwa

banyak masyarakat yang putus sekolah seiring proses pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Oleh karena itu, perlu perbaikan dan perhatian dari kementerian pendidikan dan dinas pendidikan serta seluruh masyarakat dalam membenahi persoalan ini agar mutu pendidikan di TTU dapat diperbaiki.

Dalam rangka untuk membantu peningkatan mutu pendidikan, para pengelola pendidikan dituntut untuk selalu memperkaya wawasan pengetahuan serta kemampuan yang relevan dengan pekerjaannya. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sangat turut menentukan arah perkembangan masyarakat dewasa ini, yang secara langsung berkaitan erat dengan dunia pendidikan. Namun persoalan yang sering muncul adalah menyangkut lulusan yang apabila dihadapkan pada kebutuhan tenaga kerja, sangat terasa betapa rendahnya kualitas sumber daya manusia di negara kita. Sebagian masyarakat dari dunia pendidikan mengklaim bahwa faktor penyebabnya adalah menyangkut sistem dan manajemen penyelenggaraan pendidikan. Pendidikan merupakan komponen terpenting dalam kehidupan sehari-hari. Pendidikan mempunyai peranan dan fungsi yang cukup penting bagi kehidupan manusia, baik pendidikan dalam aspek kognitif, afektif (sikap), maupun psikomotorik. Oleh karena itu, sudah menjadi suatu keharusan bagi manusia untuk dapat merasakan proses tersebut. Pendidikan diakui sebagai kekuatan yang dapat mendorong manusia mencapai kemajuan peradaban. Selain itu pendidikan memberikan bekal kepada manusia untuk menyongsong hari esok yang lebih cerah dan lebih manusiawi. Seperti layaknya seseorang yang perlu tetap sehat dan optimal dalam berkembang, memeriksa kondisi kesehatan jiwa dan raga diperlukan secara rutin. Jika disandingkan, istilah *medical check-up* tampaknya menjadi analogi yang paling tepat untuk Rapor Pendidikan dan Perencanaan Berbasis Data (PBD) bagi satuan pendidikan dan pemerintah daerah. Jika Rapor Pendidikan dan PBD adalah fasilitas *free medical check-up*, maka tujuannya adalah untuk mengetahui bagian mana yang 'kurang sehat' atau 'butuh perhatian'. Informasi dari *check-up* tersebut dibutuhkan untuk mengetahui 'obat' atau 'tindakan' apa yang paling tepat dalam memperbaiki

kualitas hingga meningkatkan mutu pendidikan. Sedangkan, dalam menjalankan sebuah aktivitas sehari-hari, manusia tidak bisa lepas dengan adanya sebuah perencanaan. Dengan adanya perencanaan yang sistematis dan tepat, maka aktivitas sehari-hari dapat berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan yang diharapkan.

Perencanaan merupakan suatu rangkaian proses menyiapkan dan menentukan seperangkat keputusan mengenai apa yang diharapkan dan apa yang akan dilakukan. Rangkaian proses kegiatan itu dilaksanakan agar harapan tersebut dapat terwujud menjadi suatu kenyataan. Menurut Yusuf (2009), perencanaan pendidikan mempunyai peran penting dan berada pada tahap awal dalam proses manajemen pendidikan, yang dijadikan sebagai panduan bagi pelaksanaan, pengendalian, dan pengawasan penyelenggaraan pendidikan. Perencanaan sebagai salah satu fungsi organik dalam manajemen, merupakan bagian integral dari fungsi-fungsi organik lainnya di dalam manajemen. Dalam proses kerjanya perencanaan menerima masukan dari fungsi-fungsi organik manajemen lainnya, misalnya dari fungsi organik pengorganisasian menerima masukan yang berupa tujuan organisasi, dari fungsi organik pengawasan menerima masukan umpan balik berupa laporan hasil pelaksanaan suatu rencana. Selain masukan dari fungsi-fungsi organik manajemen lainnya, kegiatan perencanaan juga memerlukan masukan instrumental yang terdiri atas program pengajaran tenaga, metode, instrumen, organisasi dan biaya perencanaan. Tujuan pendidikan pada hakikatnya merupakan pengejawantahan dari berbagai aspek kehidupan suatu bangsa dalam bidang agama, ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, hukum, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta keamanan dan pertahanan. Bentuk dan isi rumusan atau informasi tujuan pendidikan bagi setiap bangsa berbeda. Perbedaan itu disesuaikan dengan sistem nilai yang terkandung dalam aspek-aspek kehidupan suatu bangsa dalam kurun waktu tertentu. Menurut Sunarya (2000), walaupun terdapat berbagai perbedaan dalam isi dan rumusan tujuan pendidikan bagi setiap bangsa dalam kurun waktu tertentu, minimal terdapat tiga persamaan dari setiap tujuan

pendidikan yaitu meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan memperbaiki atau bahkan mengubah sikap peserta didik.

Berdasarkan uraian beberapa persoalan pendidikan di atas maka perlu upaya lebih serius dari pemerintah pusat, pemerintah daerah dan masyarakat untuk bersama-sama bekerja membangun pendidikan dan pelayanan pendidikan yang lebih baik bagi peserta didik. Melihat persoalan mutu pendidikan Indonesia yang masih berada pada posisi rendah maka Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi membuat platform Rapor Pendidikan untuk meningkatkan kualitas pendidikan, pemerataan pendidikan yang bermutu dan perencanaan pendidikan berdasarkan data yang tepat (raporpendidikan.kemdikbud.go.id).

Rapor Pendidikan merupakan sebuah platform yang menyediakan data laporan hasil evaluasi sistem pendidikan sebagai penyempurnaan rapor mutu yang dipakai sebelumnya. Rapor Pendidikan memiliki sejumlah perbedaan dibandingkan Rapor Mutu. Rapor Mutu mengukur delapan indikator capaian pendidikan berdasarkan Standar Nasional Pendidikan dengan menggunakan data yang bersumber dari Dapodik dan hasil penginputan langsung oleh sekolah melalui aplikasi EDS. Sedangkan Rapor Pendidikan adalah bentuk penyempurnaan dari Rapor Mutu, dimana di dalam platform ini disajikan data laporan hasil evaluasi sistem secara keseluruhan dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan. Terdapat hubungan Rapor Pendidikan dengan Rapor Mutu dan 8 Standar Nasional Pendidikan. Sebelum Rapor Pendidikan diluncurkan, Rapor Mutu terlebih dahulu hadir untuk mengukur 8 indikator capaian pendidikan berdasarkan Standar Nasional Pendidikan. Saat ini, Rapor Pendidikan juga mengakomodir indikator-indikator yang merefleksikan 8 Standar Nasional Pendidikan. Standar tersebut adalah: 1) *standar kompetensi lulusan*; 2) *standar isi*; 3) *standar proses*; 4) *standar penilaian*; 5) *standar pengelolaan*; 6) *standar GTK*; 7) *standar pembiayaan*; dan 8) *standar sarana dan prasarana*. Melalui Rapor pendidikan seluruh delapan standar tetap ada dan dikelompokkan menurut area cakupannya yaitu input, proses, dan output pembelajaran. Rapor Pendidikan diharapkan dapat menjadi

acuan bagi satuan pendidikan dan pemerintah daerah untuk mengidentifikasi, merefleksi, dan membenahi kualitas pendidikan Indonesia secara menyeluruh. Penyusunan Rapor Pendidikan dilakukan melalui berbagai asesmen atau survei nasional. Satuan pendidikan tidak perlu melakukan pengisian data sendiri, sehingga diharapkan beban administrasi satuan pendidikan dapat berkurang. Rapor Pendidikan diharapkan tidak hanya menampilkan pemetaan mutu pendidikan di daerah, namun mampu memberikan rekomendasi Perencanaan Berbasis Data (PBD).

Rapor Pendidikan dan Perencanaan Berbasis Data merupakan bagian dari kebijakan Merdeka Belajar untuk mewujudkan cita-cita Merdeka Belajar yaitu pendidikan berkualitas untuk semua. Pemanfaatan platform Rapor Pendidikan dalam melakukan Perencanaan Berbasis Data akan mendorong terjadinya perubahan perbaikan dalam hal: (1) peningkatan angka partisipasi, mulai dari pendidikan anak usia dini hingga pendidikan menengah, (2) peningkatan kualitas layanan pendidikan yang dapat menghasilkan lulusan yang berkualitas; serta (3) pendistribusian layanan pendidikan di seluruh Indonesia sehingga tidak ada anak yang tertinggal. Rapor Pendidikan disusun dari berbagai macam sumber yang sudah ada, seperti Asesmen Nasional, Data Pokok Pendidikan (Dapodik), data pendidikan dari Kementerian Agama, platform digital guru dan kepala sekolah, *tracer study* SMK, data Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK), BAN PAUD, BPS, dan seterusnya. Kehadiran Rapor Pendidikan memudahkan pemangku kepentingan dalam mengumpulkan data untuk melakukan perencanaan pendidikan. Rapor Pendidikan adalah sumber data tunggal sebagai dasar analisis, perencanaan, dan tindak lanjut peningkatan kualitas pendidikan. Rapor Pendidikan merupakan alat ukur yang berorientasi pada mutu dan pemerataan hasil belajar dengan sumber data yang objektif dan andal di mana laporan disajikan secara otomatis dan terintegrasi. Dengan adanya Platform Rapor Pendidikan, penyajian data menjadi terpusat sehingga satuan pendidikan tidak perlu menggunakan berbagai aplikasi. Pengoptimalan Platform Rapor Pendidikan untuk

Perencanaan Berbasis Data dapat menciptakan siklus perbaikan yang berkesinambungan, demi meningkatkan mutu pendidikan.

Perencanaan Berbasis Data (PBD) bertujuan untuk memberikan perbaikan pembelanjaan anggaran serta membenahan sistem pengelolaan satuan pendidikan yang efektif, akuntabel dan konkret. Selain itu, Perencanaan Berbasis Data (PBD) juga disesuaikan dengan kebutuhan satuan pendidikan atau dinas berdasarkan identifikasi masalah yang berasal dari data pada platform Rapor Pendidikan, yang kemudian mendorong satuan pendidikan dan dinas pendidikan untuk melakukan membenahan melalui penyusunan kegiatan peningkatan capaian berdasarkan hasil identifikasi dan refleksi terhadap capaian di Rapor Pendidikan dan kondisi lapangan. Terdapat 3 langkah sederhana dalam proses Perencanaan Berbasis Data (PBD), yaitu Identifikasi, Refleksi, dan Benahi (IRB).



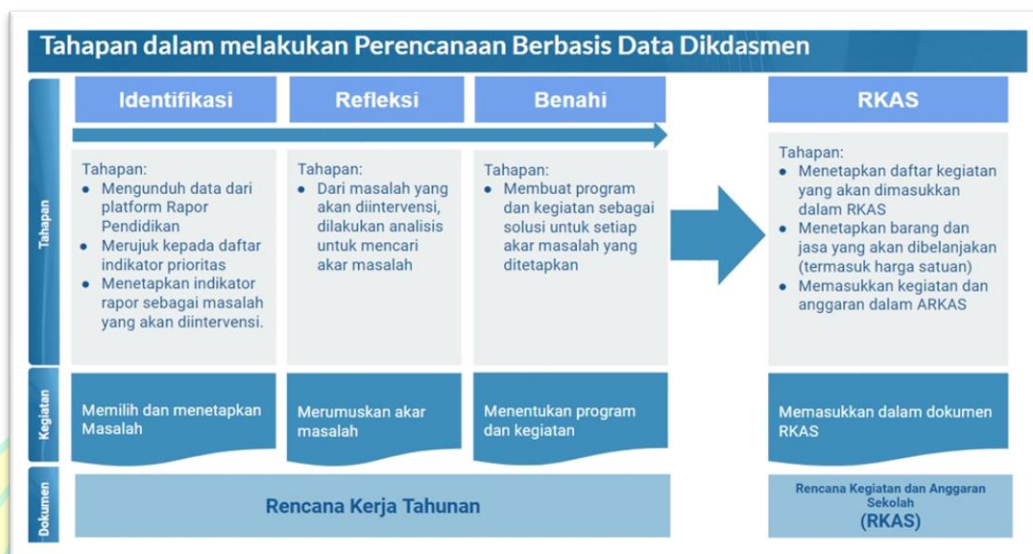
(Sumber: <https://pusatinformasi.raporpendidikan.kemdikbud.go.id>)

Gambar 1.1 Urutan proses perencanaan berbasis data.

Selain itu, perencanaan berbasis data juga bertujuan memberikan perbaikan pembelanjaan anggaran yang efektif dan akuntabel sesuai dengan

kebutuhan dinas maupun satuan pendidikan. Satuan pendidikan dan pemerintah daerah dapat melakukan refleksi diri dengan menganalisis data dalam Rapor Pendidikan, mengidentifikasi akar masalah, dan menyusun rencana kegiatan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah (RKAS) atau RKPD untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Perencanaan Berbasis Data (PBD) dilakukan pada tingkat pemerintah daerah dan satuan pendidikan. Tujuan PBD adalah untuk meningkatkan kualitas layanan pendidikan dengan menggunakan anggaran satuan pendidikan. Perencanaan Berbasis Data satuan pendidikan sendiri dibagi menjadi 2 yakni: 1) Perencanaan Berbasis Data (PBD) Pendidikan Dasar Menengah (Dikdasmen), 2) Perencanaan Berbasis Data (PBD) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

Perencanaan Berbasis Data (PBD) memiliki urgensi agar satuan pendidikan dapat melaksanakan program dan pengadaan yang tepat sasaran, sehingga dapat meningkatkan mutu pendidikan di satuan pendidikannya. Dalam menyusun Perencanaan Berbasis Data, satuan pendidikan dapat merujuk pada capaian di lima dimensi Rapor Pendidikan, yaitu: *Output*, kualitas capaian pembelajaran siswa (Dimensi A: Mutu dan relevansi hasil belajar siswa dan Dimensi B: Pemerataan pendidikan yang bermutu), proses, kualitas proses belajar siswa (Dimensi D: Mutu dan relevansi pembelajaran), *input*, kualitas sumber daya manusia dan sekolah (Dimensi C: Kompetensi dan kinerja PTK dan Dimensi E: Pengelolaan sekolah yang partisipatif, transparan, dan akuntabel).



(Sumber: Buku Saku Rapor Pendidikan, 2023)

Gambar 1.2 Tahapan Melakukan Perencanaan Berbasis Data

Dari seluruh indikator yang ada di Rapor Pendidikan, Kemendikbudristek mengusulkan 5 indikator prioritas untuk jenjang Dikdasmen sebagai fokus awal untuk perbaikan satuan pendidikan. Dalam konteks perencanaan berbasis data, satuan pendidikan dan dinas pendidikan daerah dapat melakukan transformasi pendidikan dalam kerangka Merdeka Belajar dan melakukan perencanaan menggunakan data dari Rapor Pendidikan untuk melakukan refleksi dan evaluasi bersama tenaga pendidik di satuan pendidikan. Tujuannya untuk digunakan sebagai dasar Perencanaan Berbasis Data (PBD) yang tepat dan akurat sebagai upaya peningkatan kualitas satuan pendidikan. Bila hasil literasi dan numerasi di satuan pendidikan rendah, maka pihak sekolah dapat mencoba menganalisis indikator-indikator di bagian input dan proses untuk mencari akar masalah yang menyebabkan rendahnya literasi dan numerasi. Kemudian, sekolah dapat melakukan perencanaan berbasis data tersebut dengan dibantu bimbingan dari tim Rapor Pendidikan. Pengawas satuan pendidikan juga akan mendampingi proses penggunaan rapor satuan pendidikan dalam perencanaan berbasis data. Satuan pendidikan dapat melakukan refleksi diri sebagai salah satu bagian perencanaan berbasis data, dengan cara: 1) Mempelajari dan memverifikasi data dari satuan pendidikan, 2) Mengevaluasi Rapor Pendidikan dengan kondisi riil, yaitu

dengan melakukan pengamatan, melihat data dan diskusi dengan pemangku kepentingan di satuan pendidikan, 3) Menganalisis kondisi satuan pendidikan, seperti bersama guru dan kepala satuan pendidikan, untuk melihat apakah kondisi satuan pendidikan sudah sesuai standar atau belum, 4) Menyimpulkan permasalahan dan akar masalah yang dihadapi, berdasarkan analisis bersama dengan pemangku kepentingan di satuan pendidikan, 5) Menyusun perencanaan berdasarkan hasil analisis terhadap permasalahan dan akar masalah yang sudah dilakukan.

Dalam Rapor Pendidikan digunakan istilah “dimensi”, yaitu kelompok indikator yang membagi seluruh indikator yang ada menjadi 3 aspek, yaitu: *output*, proses, dan input. *Output* menggambarkan kualitas capaian pembelajaran siswa. Proses menggambarkan kualitas proses belajar siswa. Lalu, input menggambarkan kualitas sumber daya manusia dan sekolah. Istilah lain yang digunakan adalah “indikator”, yaitu sekumpulan capaian pendidikan yang dapat dijadikan petunjuk dan refleksi diri bagi satuan pendidikan dan daerah. Indikator dibagi menjadi berdasarkan; aspek input (dimensi C dan E), proses (dimensi D), dan output (dimensi A dan B). Dimensi A menjelaskan mutu dan relevansi hasil belajar murid, dimensi B menjelaskan pemerataan pendidikan dan mutu, dimensi C menjelaskan kompetensi dan kinerja guru dan tenaga kependidikan, dimensi D menjelaskan mutu dan relevansi pembelajaran, lalu dimensi E menjelaskan pengelolaan sekolah yang partisipatif, transparan, dan akuntabel. Setelah memiliki data dari Rapor Pendidikan, data tersebut dapat dilakukan pengelolaan untuk menghasilkan bentuk intervensi yang tepat baik di satuan pendidikan maupun daerah dalam hal perbaikan mutu dan capaian pendidikan yang berkesinambungan. Bentuk pengelolaan tersebut merupakan proses dari Perencanaan Berbasis Data (PBD) yang dihadirkan dengan tujuan untuk memberikan perbaikan pembelanjaan anggaran serta membenahan sistem pengelolaan satuan pendidikan yang efektif, akuntabel dan konkret.

Selain itu, Perencanaan Berbasis Data (PBD) juga disesuaikan dengan kebutuhan satuan pendidikan atau daerah berdasarkan identifikasi

masalah yang berasal dari data pada platform Rapor Pendidikan, yang kemudian mendorong satuan pendidikan dan daerah untuk melakukan pembenahan melalui penyusunan kegiatan peningkatan capaian berdasarkan hasil identifikasi dan refleksi terhadap capaian di Rapor Pendidikan dan kondisi lapangan. Satuan pendidikan dan daerah juga tidak melakukan pengisian (input) data ke aplikasi, namun data diambil dari berbagai sistem dan sumber data yang sudah ada, seperti Dapodik, SIMPKB, AN, BPS, dan sumber lain yang relevan. Setelah memahami penjelasan lengkap di atas, perspektif yang dapat kita samakan adalah Rapor Pendidikan adalah bentuk data dan PBD adalah proses pemanfaatan datanya. Sebagai ilustrasi, apabila ada suatu satuan pendidikan belum maksimal berdasarkan hasil Asesmen Nasional (AN), tentu akan lebih mudah jika kita bisa mengetahui bagian mana yang perlu perhatian khusus. Disinilah peran Rapor Pendidikan dan PBD bertugas berupa memberikan kemudahan didukung landasan data sebelum melakukan proses yang lebih panjang sehingga menghindari kesalahan deteksi yang kerap terjadi akibat tidak adanya landasan data acuan. Skenario lain yang mungkin terjadi jika tidak ada Rapor Pendidikan dan Perencanaan Berbasis Data adalah intervensi yang dilakukan tidak tepat sasaran sehingga membuat perencanaan yang kurang optimal dan anggaran yang terserap menjadi tidak efektif digunakan. Berdasarkan latar belakang di atas peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang Pemanfaatan Platform Rapor Pendidikan dalam Melakukan Perencanaan Pendidikan Berbasis Data di Tingkat Sekolah Dasar di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Timor Tengah Utara, wilayah Kecamatan Insana Barat, Nusa Tenggara Timur.

B. Fokus dan Sub Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka fokus penelitian ini adalah Pemanfaatan Platform Rapor Pendidikan dalam Melakukan Perencanaan Pendidikan Berbasis Data di Tingkat Sekolah Dasar. Adapun sub fokus penelitian ini sebagai berikut:

1. Perencanaan Pendidikan Berbasis Data melalui penggunaan Rapor Pendidikan pada tingkat Sekolah Dasar di Kecamatan Insana Barat, Nusa Tenggara Timur.
2. Implementasi Rapor Pendidikan pada tingkat Sekolah Dasar di Kecamatan Insana Barat, Nusa Tenggara Timur.
3. Hambatan, Tantangan dan Solusi dalam menggunakan Rapor Pendidikan pada tingkat Sekolah Dasar di Kecamatan Insana Barat, Nusa Tenggara Timur.

C. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan fokus dan sub fokus penelitian di atas maka dapat dirumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana Perencanaan Pendidikan Berbasis Data melalui penggunaan Rapor Pendidikan pada tingkat Sekolah Dasar di Kecamatan Insana Barat, Nusa Tenggara Timur?
2. Bagaimana Implementasi Rapor Pendidikan pada tingkat Sekolah Dasar di Kecamatan Insana Barat, Nusa Tenggara Timur?
3. Bagaimana Hambatan, Tantangan dan Solusi dalam Menggunakan Rapor Pendidikan pada tingkat Sekolah Dasar di Kecamatan Insana Barat, Nusa Tenggara Timur?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian di atas maka tujuan penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui dan memahami pemanfaatan rapor pendidikan pada tingkat Sekolah Dasar di Kecamatan Insana Barat, Nusa Tenggara Timur.
2. Untuk mengetahui dan memahami proses Perencanaan Pendidikan Berbasis Data melalui penggunaan Rapor Pendidikan pada tingkat Sekolah Dasar di Kecamatan Insana Barat, Nusa Tenggara Timur.
3. Untuk mengetahui dan memahami hambatan dan tantangan dalam pemanfaatan Rapor Pendidikan pada tingkat Sekolah Dasar di Kecamatan Insana Barat, Nusa Tenggara Timur.

E. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini sebagai berikut:

1. Teoretis

Secara teoritis hasil penelitian ini dapat digunakan untuk dijadikan acuan atau pembandingan dengan penelitian lain yang sejenis yang akan diteliti serta untuk mengembangkan keilmuan khususnya tentang perencanaan pendidikan oleh pemerintah daerah melalui data yang ada dalam rapor pendidikan.

2. Praktis

Hasil penelitian mengenai perencanaan pendidikan berbasis rapor pendidikan di Kecamatan Insana Barat, Kabupaten Timor Tengah Utara, Nusa Tenggara Timur secara praktis dapat memberikan manfaat kepada kepala sekolah, guru, pengawas pendidikan dan dinas pendidikan dalam melakukan perencanaan pendidikan berbasis data untuk meningkatkan kualitas pendidikan.

F. State of The Art

Penelitian terdahulu dilakukan oleh Rijon (2012) dengan judul “Perencanaan Pendidikan Berbasis Masyarakat” dalam jurnal *Educational Management* Universitas Negeri Semarang. Penelitian ini berfokus pada perencanaan pendidikan berbasis masyarakat khususnya terkait perencanaan implementasi kurikulum dan perencanaan akademik. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data wawancara, observasi dan studi dokumentasi. Hasil penelitian yang ditemukan yaitu kurikulum yang diterapkan di MA Darunnajat ialah kurikulum campuran atau modifikasi antara kurikulum nasional yang dipadukan dengan kurikulum pondok Pesantren Darunnajat. Perbedaannya ialah penelitian ini berfokus pada perencanaan pendidikan berbasis masyarakat yang berfokus pada masalah implementasi perencanaan kurikulum dan perencanaan akademik.

Penelitian berikut dilakukan oleh Suhada (2020) dengan judul “Problematika, Peranan, dan Fungsi Perencanaan Pendidikan di Indonesia” dalam jurnal *Adragogi*. Pendekatan penelitian ini ialah studi literatur dengan teknik

pengumpulan data mencari di *google scholar* dan studi pustaka. Temuan dalam penelitian ini yaitu terdapatnya masalah dalam pendidikan Indonesia dan perencanaan pendidikan. Perbedaannya ialah penelitian ini dalam pendekatan penelitian, teknik pengumpulan data dan fokus penelitian yang lebih menyeluruh.

Penelitian Idris tentang “Perencanaan Pendidikan dalam Konteks Desentralisasi Pendidikan” yang dimuat dalam jurnal *Pedagogi* pada tahun 2020. Fokus penelitian ini yaitu pada upaya pemerataan pendidikan dengan memberikan wewenang kepada pemerintah daerah untuk mengembangkan dan menumbuhkan pendidikan sehingga diharapkan dapat meningkatkan mutu pendidikan. Perbedaannya penelitian ini berfokus pada perencanaan pendidikan dalam konteks desentralisasi atau kebijakan pemerintah pusat memberikan wewenang dan tanggung jawab kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengelola wilayahnya sendiri.

